

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada SKPD Kota Yogyakarta)**

Teguh Erawati, Yohanes Marianus Yafandi
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara No. 121, Umbulharjo, Yogyakarta
Email: eradimensiarch@gmail.com
riyanyafandi96.ry@gmail.com

ABSTRACT

Budgets are one of the most important and relevant things in local government, because budgets have an impact on performance that is attributed to the function of government as the State's hearing. Through a clear budget it will have an impact on the effectiveness of government work plans and accountability processes on a periodic basis. The purpose of this study is to determine the relationship of clarity of budget targets to the performance accountability of government agencies and internal control as a moderation variable. The population used in this study is SKPD Yogyakarta. The type of data in this study is quantitative. The data sources used are primary data sourced from the distributed kusioner. The analysis technique used is simple regression, t test, r test and pure moderation test. The results of this study is the clarity of budget targets have a positive effect on the performance accountability of government agencies and internal controls can strengthen the relationship of variable clarity of budget targets to the performance accountability of government agencies.

Keywords: clarity of budget targets, internal controls, performance accountability of government agencies.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban LAN (2003). Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategik. Sebagai organisasi *sector public* pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas Fauzan (2017). Dalam instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan kepala lembaga administrasi negara (LAN) nomor 589/ix/6/y/1999 tentang pedoman

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang telah diperbarui dengan keputusan lan nomor 239/ix/6/8/2003 menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penetapan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Salah satu yang menunjang akuntabilitas kinerja adalah kejelasan sasaran anggaran. Anggaran merupakan hal yang penting dan relevan di pemerintahan daerah, karena

anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Primayoni (2014).

Anggaran adalah pedoman atau tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah dan yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuanrupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis (PP No. 24/2005). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut Fauzan, (2017). Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksanaan suatu anggaran akan menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam pekerjaannya. Anggaran daerah harus mampu menjadi tolak ukur pencapaian kerja yang diharapkan. Sehingga perencanaan anggaran daerah yang telah dibuat sebelumnya harus mampu menggambarkan sasaran kinerja yang jelas.

Adanya anggaran yang dinyatakan secara jelas dari pemerintah akan mempermudah bagi pihak-pihak yang memang mempunyai tanggungjawab dalam pengimplementasian anggaran tersebut. Semakin jelas tujuan dari anggaran tersebut maka akan mempermudah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan tujuan yang telah ditetapkan disebuah organisasi Indrayani,dkk(2017). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja Mardiasmo(2001) pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan pertanggung jawaban APBD. Adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja manajerial SKPD Primadana (2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah berbeda-beda. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2002).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut Fauzan, (2017).

Pengawasan Internal

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Kejelasan Sasaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah aparat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atau organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah Primayoni, (2014). Dalam penelitian yang dilakukan Kusumaningrum (2010) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan primadana (2014) yaitu menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh

secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

H1: Kelasana sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Pengawasan internal dapat memperkuat kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ernawilis, (2015). Dengan adanya pengawasan disetiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD Primadana, (2014). Hal ini sejalan dengan pendapat pakar keuangan daerah yaitu Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang meliputi setiap tahap pengolahan keuangan daerah, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan besar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD.

H2: pengawasan internal dapat memperkuat kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

DEFINISI OPERASIONAL

Vaeiabel Independen

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Setiawan (2017).

Variabel Dependen

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006) didalam setiawan (2013).

Variabel Moderasi

Sistem pengawasan internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Fikri, dkk, 2016).

Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini mengambil lokasi di SKPD Kota Yogyakarta yakni pada dinas Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Dinas PU, Perumahan & Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Sasaran pengamatan difokuskan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi pada SKPD Kota Yogyakarta. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data. sampel diperoleh dari penyebaran kuisisioner pada pegawai SKPD Kota Yogyakarta. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dengan penyebaran kuisisioner kemudian diolah menggunakan spss. Kemudian dilanjutkan dengan menguji validitas dan reabilitas untuk pengujian terhadap instrument penelitian. Terdapat beberapa asumsi sebelum pengujian penelitian ini yaitu asumsi klasik yang didalamnya meliputi uji normalitas data, heterokedastisitas, multikolinearitas. Dan kemudian dianalisis menggunakan pure moderator untuk menentukan interaksi variabel moderasi yang dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 * \beta_3 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kejelasan sasaran anggaran
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X1 : Kejelasan sasaran anggaran
- X2 : Pengawasan Internal
- ε : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Parsial (uji t) Hipotesis 1

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,777	3,990		3,703	,001
	X1	,603	,093	,675	6,464	,000

a. Dependent Variable: Y
 b. Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan table diatas , maka hasil persamaan linearnya sebagai berikut:

$$Y = 14,777 + 0,603 + \varepsilon$$

Tabel diatas menunjukkan t hitung lebih besar dari t table yaitu sebesar 6,464 > dari t table 1,676 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Hasil Uji Koefisien Detreminasi (R^2) H1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.455	.444	3.048

a. Predictors: (Constant), X1
 b.Sumber: Data primer diolah 2018

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,444 yang berarti nilai akuntabilitas kinerja dipengaruhi sebesar 4,44% oleh kejelasan sasaran anggaran. Sisanya dipengaruhi oleh *factor* lain diluar penelitian.

Analisis Hasil Pure Moderasi Hipotesis 2

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,222	3,475		6,106	,000
	X1	-,036	,145	-,040	-,246	,806
	interaksi	,013	,003	,838	5,163	,000

a. Dependent Variable: Y
 b. Sumber: Data primer diolah 2018

Pada tabel 4.13 tersebut variabel moderasi (interaksi) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha*.

Table Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.805 ^a	.647	.633	2,478

Predictors: (Constant), kejelasan sasaran anggaran*pengawasan internal, pengawasan internal, kejelasan sasaran anggaran

Sumber: Data primer diolah 2018

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,647 yang lebih besar dari hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di pengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan internal. Sisanya adalah sebesar 37,7% akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di pengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. pengujian hipotesis 1, sedangkan pada nilai R2 adalah sebesar 0,633 atau sebesar 63,3% nilai.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis 1 yang diajukan adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Alasan atau argumentasi yang dapat dijelaskan atas berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut yaitu, ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana suatu anggaran akan menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam pekerjaannya. Anggaran daerah harus mampu menjadi tolak ukur pencapaian kerja yang diharapkan. Sehingga perencanaan anggaran daerah yang telah dibuat sebelumnya harus mampu menggambarkan sasaran kinerja yang jelas (Indrayani,2017). Berdasarkan distribusi dari jawaban responden bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki presentase jawaban setuju dan sangat setuju senilai 61,53% - 79,62%. Hasil ini mendukung bahwa variabel kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Hal ini berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran daerah, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum 2010), dalam

penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2013) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laksana dkk, 2014) yang berjudul pengaruh kejelasan sasara, anggaran fungsional dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas public di kabupaten Batang yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Pengawasan Internal Memperkuat Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis 2 yang diajukan adalah pengawasan internal memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian melalui program SPSS 16.0, maka pengawasan internal memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Berdasarkan table 4.12 tersebut, maka dapat dilihat bahwa secara individual Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki probabilitas signifikansi yang lebih besar dari *alpha* yaitu sebesar 0,806 dan

variabel moderasi (intraksi) yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel pengawasan internal adalah variabel moderasi. Berdasarkan hal tersebut maka H₂ diterima dan H₀ tidak diterima. Berdasarkan distribusi dari jawaban responden bahwa variabel pengawasan internal memiliki presentase jawaban setuju dan sangat setuju senilai 59,69% - 100%. Hasil ini mendukung bahwa variabel pengawasan internal dapat memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran daerah, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Primadana (2014) yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dan variabel pengawasan internal mampu memoderisasi pengaruh variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ernawilis, (2015) bahwa pengawasan internal tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Semakin jelas sasaran anggaran maka semakin mempermudah para pegawai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas secara periodik.

Variabel pengawasan internal mampu memperkuat hubungan kejelasan sasaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Dengan adanya pengawasan internal di setiap tahapan pengelolaan anggaran diharapkan proses pelaksanaan anggaran dapat terlaksana dengan baik

dan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi yakni diharapkan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran mampu memaksimalkan segala kegiatan baik itu berbentuk fisik atau pelayanan. Selain itu juga dengan adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD.

Keterbatasan

Peneliti kesulitan menentukan obyek penelitian yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran partisipatif. Penelitian ini juga hanya mengambil tiga variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, pengawasan internal sebagai variabel moderasi. Yang terakhir hanya dilakukan pada beberapa dinas yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapat hasil yang lebih baik.

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat berupaya meneliti faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga dapat diketahui faktor mana saja yang dapat berpengaruh secara positif ataupun negatif.
2. Bagi instansi pemerintahan, agar lebih baik lagi dalam melakukan tingkat perencanaan anggaran sehingga dengan adanya anggaran yang jelas semakin mempermudah pencapaian kinerja serta pada akuntabilitas pelaporan hasil kinerja selama satu periodik.
3. Bagi pihak universitas lebih banyak menambah bacaan skripsi sehingga mahasiswa lebih mengerti dan mengetahui dinamika yang terjadi pada sektor publik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawilis. 2015. "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran,

- Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi Kab. Kuantan Singing”. *Jom FEKON Vol. 2 No. 2, Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.
- Fauzan, Reyhan Hady. 2017. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)”. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.
- Fikri, Ali M, dkk, 2016, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov. Ntb)
- Indrayani, dkk., 2017. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Public”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol: 8 No. 2)*.
- Lembaga Administrasi Negara – LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Laksana, dkk., 2014. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang”. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*.
- Kusumaningrum, I. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Prodi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro : Semarang
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Prihandini. 2011. “*Structural Equation Modelling (SEM) dengan Model Struktural Regresi Spasial*, Tesis Program Magister Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember”. *Surabaya*.
- Primadana, dkk., 2014. “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi”. *e-Journal SI Ak*
- Putra, Deki. 2013. “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Perangkat Daerah Kota Padang”. *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.
- Putri, Riszka Aulia. 2017. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah”. *Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*
- Primayoni, dkk., 2014. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No: 1)*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Setiawan. 2013. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Setiawan, Hari. 2017. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating”. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.